

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar Penelitian

Teori Keagenan digambarkan sebagai hubungan antara agen (manajer) dengan prinsipal (pemegang saham). Dengan konsep ini, agen dapat dikatakan sebagai manajer yang mempunyai kontak langsung dengan manajemen didalam sebuah perusahaan. Principal disebut juga sebagai orang/lembaga yang memiliki saham di suatu perusahaan (Shareholders). Kepentingan principal dalam teori ini sebagai pendesainan kontrak yang tepat guna menyeimbangkan kepentingan dan hal konflik yang dapat terjadi.(Lestari & Murtanto, 2018).

Didalam manajemen dapat dengan mudah terjadi kepentingan antara agen dengan principal yang berbeda, yang dimana yakni salah satu kesimpulan yang bisa diambil dari teori keagenan. Hal ini lah yang sering disebut dengan *Asymmetric Information*. Dimana hal ini menyebabkan terdapat saluran informasi antara principal dan agen yang tidak sama (Marsheila, 2017). Begitu juga yang disampaikan dalam (Erawati Teguh & Lestari Ayu Nurma, 2019) bahwa Teori Agensi memberikan atau mencapai suatu titik tingkat kemakmuran dalam satu pihak saja karena terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda didalam.

2.2 Manajemen Laba

Manajemen laba (*earnings management*) didefinisikan sebagai kegiatan yang didalamnya terdapat usaha manajemen guna memaksimalkan dan meminimumkan laba pendapatan perusahaan sesuai dengan kepentingan manajer (Lestari & Murtanto, 2018) atau suatu kondisi kegiatan ekonomi yang telah terjadi di perusahaan dan hasil tersebut dalam bentuk angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan (Shiyammurti & Rachman, 2015). Tindakan dalam kegiatan ini yang dilakukan menyimpang dari *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)* karena dianggap dapat memberikan perubahan pendapatan dari yang sebenarnya. Ketika para manajer (Abata & Migiro, 2016). Tindakan manajemen laba ini juga menyebabkan kepentingan manajer sendiri dalam meningkatkan penghasilan dan meminimalkan beban pengeluaran sehingga para investor tertarik guna berinvestasi dalam suatu perusahaan tertentu (Erawati Teguh & Lestari Ayu Nurma, 2019). Manajemen Laba juga mengadopsi kebijakan akuntansi dan *GAAP* yang berlaku hal yang lumrah dalam pengambilan keputusan yang diterima secara umum baik yang diluar atau pun yang umum (Marsheila, 2017).

2.3 Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan selanjutnya sering disebut dengan *Good Corporate Governance (GCG)* adalah istilah yang dipopulerkan pertama kali oleh Cadbury Committee pada tahun 1992. Kemudian oleh *Organization for Economic Corporation and Development (OECD)* diadopsi menjadi 4 prinsip *Good Corporate Governance*, (GCG) yaitu Kewajaran (*Fairness*), Keterbukaan

(*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Pertanggungjawaban (*Responsibility*), (Kumaat, 2011).

Good Corporate Governance (GCG) seperangkat aturan yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan dengan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan pemakai kepentingan informasi keuangan lainnya. (*Stakeholders*). Lanjut dalam pendapat teori yang lain dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, adanya suatu keterkaitan antara satu sama lain yang mempunyai hak dan kewajiban yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus dan pihak yang mengelola seperti pihak kreditur, pemerintah dan para karyawan lainnya (Lestari & Murtanto, 2018).

Good Corporate Governance (GCG) juga mempunyai tuntutan yang dilihat dari 3 perspektif hubungan antarstakeholders yaitu: Hubungan antara Internal *Stakeholders* sebuah korporasi, Hubungan antara korporasi diwakili oleh *Board Of Commissioners (BOD)* atau Dewan Komisaris, Hubungan antara korporasi dan seluruh *stakeholders* (Kumaat, 2011).

2.3.1 Dewan Direksi

Dewan adalah sebagai perangkat utama ketika dalam sebuah tata kelola perusahaan di organisasi manapun. Dewan juga harus memastikan kredibilitas laporan keuangan yang mereka presentasikan ke publik dengan memastikan bahwa prosedur untuk menjaga integritas laporan keuangan dan memastikan kepatuhan dengan hukum dan etika yang ditetapkan, dan kurang dari itu dapat menyebabkan manajemen laba yang tidak memadai, terutama di mana ada pemantauan dan pengawasan. Dewan direksi juga memiliki kelebihan yang membedakannya dari

pemilik dan pejabat manajemen organisasi. Dalam keadaan ini dikategorikan ke dalam demografi dewan dan struktur dewan (Osemene, Adeyele, & Adinnu, 2018).

Tanggung jawab utama dewan direksi adalah sebagai pemangku kepentingan lain yang diberikan pengungkapan berkualitas tinggi pada hasil keuangan dan operasi yang bersangkutan. Sementara diantara yang lain peneliti mendapatkan relasi positif ukuran dewan dan manajemen laba, dan selebihnya menemukan negatif. Dalam kesempatan lain juga ditemukan semakin banyak orang di tingkat dewan, pengawasan manajer yang kurang efektif, dan semakin tinggi kemungkinan manajemen laba. Studi lain mengakui bahwa ukuran papan dewan mungkin terkait juga dengan tingkat akrual diskresioner yang lebih besar dan beragam (Abata & Migiro, 2016).

2.3.2 Dewan Komisaris

Dewan komisaris yaitu organ entitas yang memiliki tanggung jawab dan wewenang atas segala pengurusan perusahaan. Dan memiliki peran untuk mengawasi segala tindakan pekerjaan dewan direksi dan juga berhak melakukan pemberhentian sementara waktu apabila diperlukan (Shiyammurti & Rachman, 2015).

2.3.3 Komite Audit

Struktur Organisasi didalam perusahaan ini berfungsi membantu mengawasi para Dewan Direksi dan Dewan Komisaris setiap pekerjaan mereka yang tugas nya saling berkaitan dalam pengendalian, pelaporan keuangan dan standar yang berlaku

dalam informasi keuangan yang dipakai nya (Shiyammurti & Rachman, 2015). Dan perusahaan yang ada di indonesia pada umumnya banyak mewajibkan untuk membentuk komite audit, yang termasuk dalam konsep penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dan juga dapat memilih auditor eksternal apabila ingin melakukan audit dalam internal perusahaan (Sudjatna & Muid, 2015). Komite Audit juga memiliki sifat independensi yang baik dalam melaksanakan segala tugas dan pelaporan nya untuk itu harus benar-benar dituntut memiliki independensi yang baik. BAPENAS juga mewajibkan Komite Audit untuk membuat laporan dalam setiap tahun nya sebagai bentuk tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam penugasan nya tersebut (Lestari & Murtanto, 2018).

Good Corporate Governance (GCG), merupakan suatu peranan strategis dalam menjaga keakuratan dalam menyusun laporan keuangan, yang merupakan juga salah satu fungsi dari komite audit untuk menerapkan prosedur tata kelola yang baik dan memastikan terjaganya sistem pemantauan perusahaan yang baik. Dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, komite audit dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, Selain itu, juga tertulis dalam keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No Kep-305/BEJ/07-2004 dan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 No. Kep-643/BL/2012 tentang Komite Audit (Marsheila, 2017).

Tugas komite audit adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi setiap laporan keuangan yang *up to date*
2. Melihat ketaatan perusahaan atas aturan perundang-undangan
3. Pemeriksaan auditor internal yang diterapkan.

4. Penerapan manajemen resiko oleh direksi agar dapat dikontrol oleh dewan komisaris.
5. Pengaduan yang berhubungan dengan emiten dapat dilaporkan kepada dewan komisaris.
6. Menjaga keakuratan perusahaan.

2.4 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan perusahaan tersusun dalam Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional, yang dimana Struktur Manajerial lebih memiliki sebagian besar saham manajemen yang dominan dibandingkan para pemegang saham yang lain nya, sehingga lebih optimal dalam mengawasi tindakan saham dan manajemen laba di internal perusahaan (Lestari & Murtanto, 2018). Struktur Kepemilikan juga merupakan suatu cerminan distribusi kekuasaan dan memiliki pengaruh diantara para pemegang saham yang lain nya, seperti yang disampaikan juga bahwa Struktur Kepemilikan mempengaruhi perilaku manajer perusahaan (Nugroho, 2017).

2.4.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham yang paling banyak di miliki oleh manajemen perusahaan dan paling bnyak dimiliki oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah kepemilikan manajerial, dengan kepemilikan tersebut dapat menciptakan kinerja perusahaan secara luas dan optimal dan saling memotivasi, sehingga para manajer dapat bertindak hati-hati. Karena apabila lalai dalam pekerjaan nya maka

dapat menanggung tindakan yang diperbuatnya. Untuk itu para manajemen juga diminta untuk meningkatkan control terhadap perusahaan nya itu sendiri (Lestari & Murtanto, 2018). Kepemilikan Manajerial juga dapat dihitung dengan membagi saham yang dimiliki oleh manajemen dengan seluruh saham perusahaan yang sangat dipengaruhi oleh motivasi perusahaan (Nugroho, 2017).

Manajer dan CALK dapat melihat Perbandingan kepemilikan saham yang dimana bagian tersebut dapat dilihat. Kepentingan manager dengan pemegang saham dapat disetarakan dengan kepemilikan saham manajerial, karena manajer harus berani mengambil keputusan untuk mendapatkan keuntungan dan bersedia menerima resiko kerugian jika mengambil keputusan yang buruk. Kinerja perusahaan semakin baik dapat mempersatukan kepentingan manajer dan pemegang saham. (Marsheila, 2017). Dari sudut pandang suatu penelitian teori akuntansi, Kebijakan yang diberikan manajer akan menentukan persentase besar atau kecilnya suatu laba yang dihasilkan (Purba & Effendi, 2019).

2.4.2 Kepemilikan Institusional

Konflik keagenan antara pemegang saham dan manajer mempunyai peran yang sangat penting dalam penghindaran kepemilikan institusional. (Marsheila, 2017). Dalam setiap keputusan manajer harus diiringi dengan keberadaan kepemilikan institusional. Dikarenakan adanya kerjasama investor institusional yang dipercaya tidak mudah terhadap perilaku manipulasi laba dalam memutuskan sesuatu.

Variabel ini juga pembagian persentase dari saham yang beredar, dengan hadirnya para investor institusional dari dapat membantu pengawasan dan kebijakan perusahaan. Dengan diadanya seperti itu dapat membantu mengurangi perilaku manajemen laba yang diperbuat oleh manajemen (Lestari & Murtanto, 2018).

Lembaga institusi atau Lembaga yang berwenang memiliki saham disebut juga dengan Kepemilikan Institusional, dengan adanya Kepemilikan Institusional mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Dalam kepemilikan Institusional juga terdapat kelebihan: 1) adanya ketrampilan dalam mengawasi dan menganalisis kesiapan informasi. 2) Mempunyai niat dalam melaksanakan pengamanan didalam perusahaan (Purba & Effendi, 2019).

Institusi dalam Kepemilikan Institusional dapat berupa perusahaan asuransi, perusahaan perbankan atau pun lembaga lainnya yang dimana dikenal juga dengan sebutan lain yaitu *Blackholders*, atau kepemilikan lain yang mempunyai kepemilikan individu atas nama perorangan diatas 5% (Nugroho, 2017).

2.5 Penelitian Terdahulu

“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba”. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen

laba sedangkan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba (Yendrawati, 2015).

“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia”. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menyatakan Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba dan Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positif terhadap Manajemen Laba dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba (Larastomo et al., 2016).

“Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris Dan Komite Audit, Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba”. Pengujian menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menyatakan Dewan Komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap Manajemen Laba, Efektivitas Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba, Kepemilikan Terkonsentrasi dengan hasil pengaruh negatif terhadap Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba, Kinerja Perusahaan berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba. *Leverage* berpengaruh negative terhadap Manajemen Laba (Lestari & Murtanto, 2018).

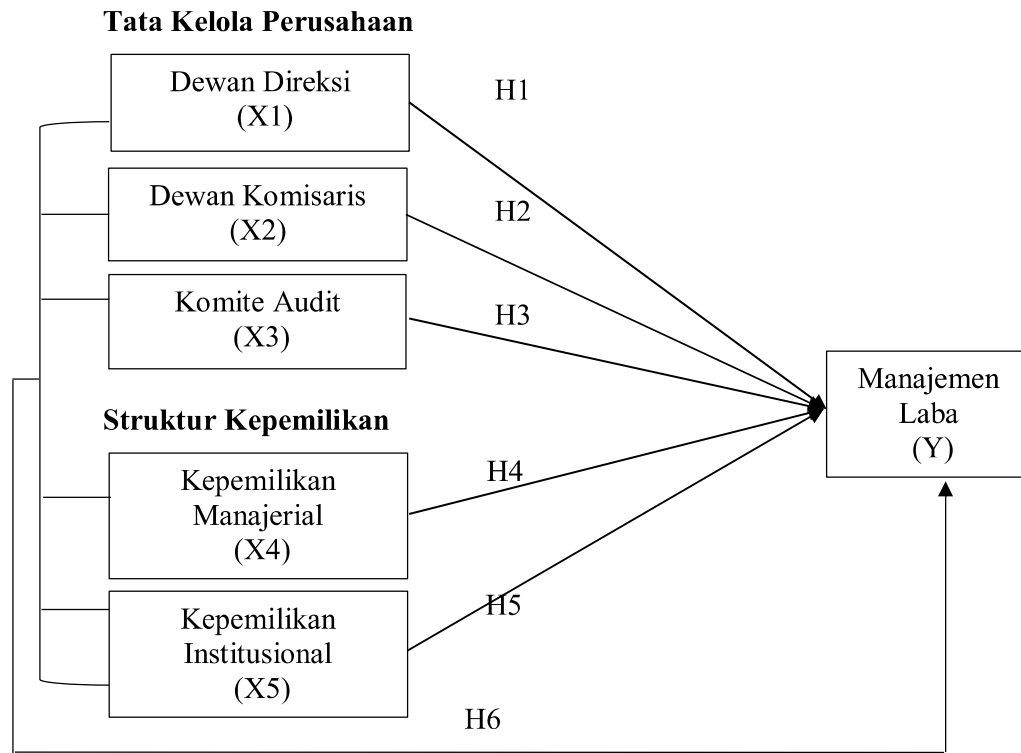
“Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning), Kualitas Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba”. Pengujian ini menggunakan regresi linear berganda. Penelitiannya menyatakan Perencanaan

Pajak berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba, Kualitas Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba (Erawati Teguh & Lestari Ayu Nurma, 2019).

“Pengaruh Struktur Kepemilikan, Keaktifan Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba”. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menyatakan Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Keaktifan Komite Audit dan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba (Sudjatna & Muid, 2015).

2.6 Kerangka Pemikiran

Manajemen laba dipilih sebagai variabel terikat, sedangkan tata kelola perusahaan dipilih sebagai variabel yang diikat dan diukur dengan variabel Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Struktur Kepemilikan dengan dengan variable Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba

H2: Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.

H3: Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Manajamen Laba.

H4: Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.

H5: Kepemilikan Institusional berpengaruh sinfikan terhadap manajemen Laba.

H6: Manajemen Laba berpengaruh signifikan terhadap Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional.